



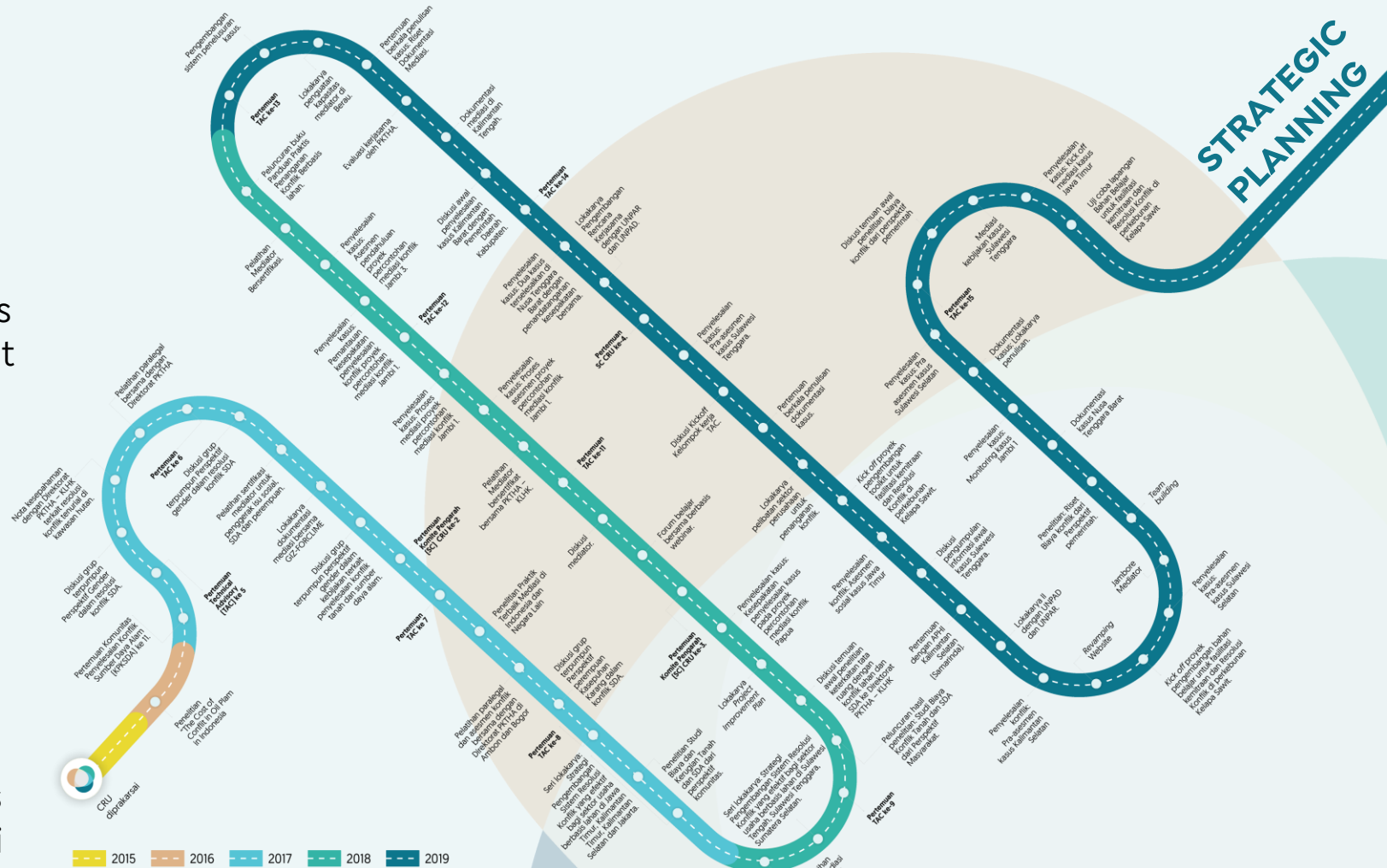
Conflict  
Resolution  
Unit

# Peningkatan Kapasitas Resolusi Konflik

**Portofolio CRU Periode 2015–2020 dalam  
Penyelesaian Konflik Agraria**

Conflict Resolution Unit  
Indonesia Business Council for Sustainable Development

- Conflict Resolution Unit (CRU)
  - didirikan pada tahun 2015 sebagai inisiatif Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
  - diinkubasi melalui Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD).
- Sasaran
  - menjadi lembaga jasa mediasi terkemuka di Indonesia;
  - untuk memberikan dukungan yang efektif, independen dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik pengelolaan lahan dan sumber daya alam; dan,
  - memperbaiki iklim investasi berbasis lahan dan sumber daya alam melalui upaya pengurangan risiko yang terkait dengan konflik tersebut.



# Conflict Resolution Unit

## Visi

“Menjadi lembaga yang memberikan dukungan efektif, independen, dan andal bagi penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam menuju pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif”.

## Misi

1. Membentuk lembaga independen untuk menyelesaikan konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan dukungan hukum dan kelembagaan yang kuat dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan iklim investasi berbasis lahan dengan menangani masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta memastikan perlindungan lingkungan yang efektif.
2. Membangun dukungan dan legitimasi konstituen yang kuat untuk CRU sebagai lembaga resolusi konflik yang andal dalam memediasi kasus tenurial di tingkat tapak dan implementasi kebijakan nasional, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendekatan penyelesaian konflik.
3. Membangun kredibilitas dan legitimasi dengan meningkatkan dan memperkuat sistem manajemen konflik CRU yang ada untuk menangani kasus-kasus besar, kompleks, multipihak secara efektif, terutama yang melibatkan sengketa kebijakan publik dan kasus-kasus kepentingan nasional.
4. Mengembangkan sistem manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas mediator, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan, melalui dokumentasi, penerbitan makalah, pelatihan, magang, dan advokasi masyarakat luas dengan menggunakan teknologi berbasis digital, sebagai upaya untuk mengarusutamakan penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

## Komite Pengarah

- **Shinta Widjaja Kamdani**  
Waketum KADIN bidang Kerjasama Internasional  
Presiden IBCSD
- **Tony Wenas**  
CEO Freeport Indonesia  
Ketua Dewan Pembina IBCSD
- **M. Said**  
Direktur PKTHA – Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  
KLHK
- **Dr. Larry Fisher**  
Profesor Riset pada Universitas Arizona

## Tim Eksekutif

- **Arief Wicaksono**  
Direktur
- **Ilya Moeliono**  
Penasehat Senior
- **Falatehan Zainy**  
Manajer Program
- **Beatrice Moilla**  
Manajer Operasional
- **Ginangar Tamimy**  
Manajer Pelibatan
- **Rinawati Eko**  
Staf Kelola Pengetahuan
- **Laras Novalia**  
Staf Administrasi

## Komite Kepenasehatan Teknis

- **Rezal Kusumaatmadja**  
COO PT. RMU/Ketua
- **Agung Wiyono**  
Head of Social & Security Division of Sinarmas Forestry
- **Larry Fisher**  
Profesor Riset pada Universitas Arizona
- **Ichsan Malik**  
Pengajar pada Universitas Pertahanan
- **Tiur Rumondang**  
Direktur RSPO Indonesia
- **Ida Surianny**  
Manajer Program, DFID
- **Ahmad Zazali**  
Direktur, Impartial Mediation Network
- **Tony Budidjaja**  
Budidjaja International Lawyers
- **Bresman Marpaung**  
Kesubdit Penanganan Konflik, Ditjen PSKL, KLHK
- **Ravin Khrisnan**  
Mantan Grievance Manager PT. Musim Mas

## Komite Kemandirian Lembaga

- **Sarwono Kusumaatmadja**  
Ketua
- **Suraya Afiff**  
Pengajar pada Universitas Indonesia
- **Kamala Chandrakirana**  
ESCAP-UN Women's Asia Pacific Regional WG on Women, Peace & Security
- **Usep Setiawan**  
Penasehat Utama, Kantor Staf Presiden (KSP)
- **Ngurah Ari Bebasari**  
Penasehat Senior BUMN
- **Ridha Saleh**  
Mantan Komisioner Komnas HAM
- **Joko Tri Haryanto**  
Peneliti Utama, BKF, Kemenkeu

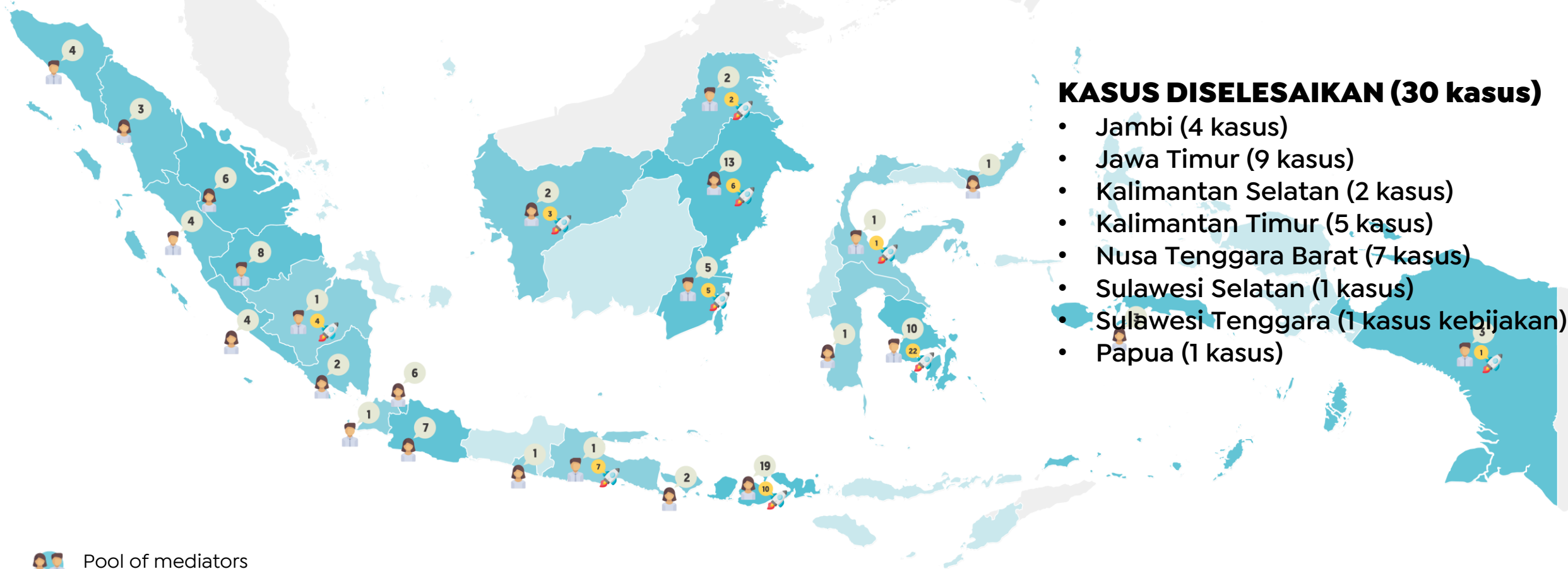
# CRU PORTOFOLIO 2015-2019



## Beneficiaries



# KONFLIK TENURE DISELESAIKAN (Sektor Kehutanan & Perkebunan)

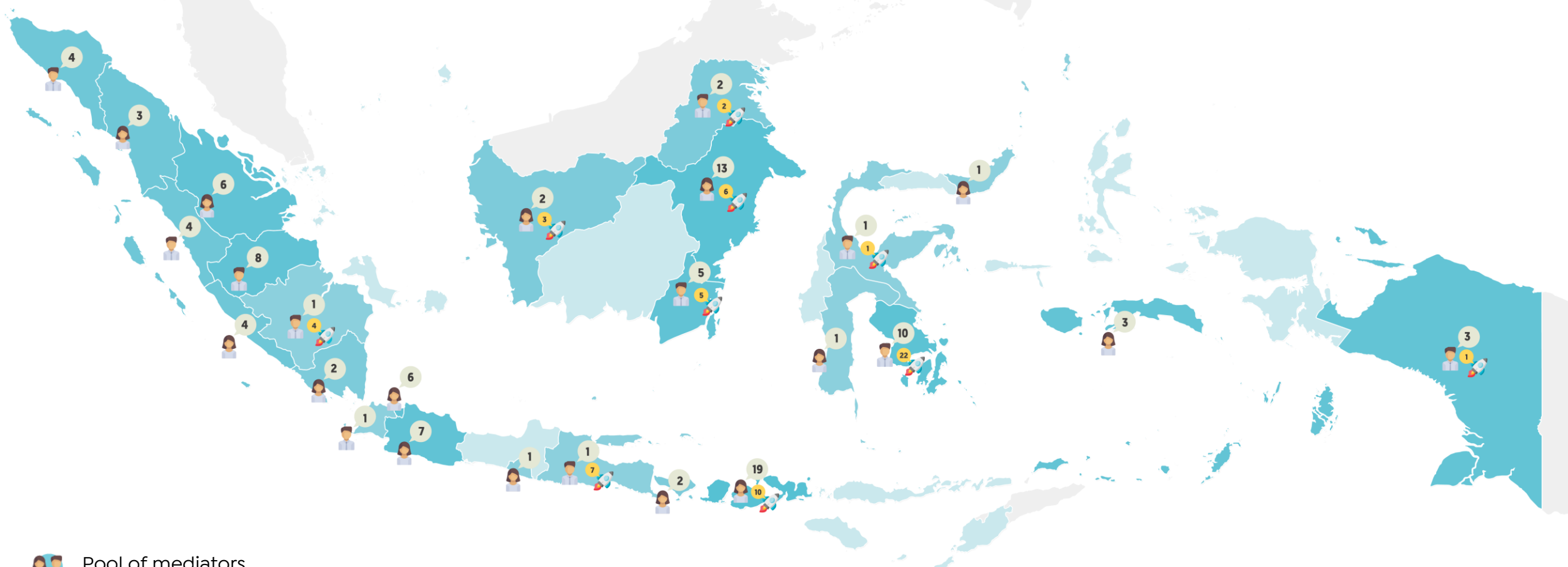




Pool of mediators



Tenure conflicts handled

# JEJARING MEDIATOR & KONFLIK TENURIAL DISELESAIKAN



 Pool of mediators  
 Tenure conflicts handled

## Senior Mediator & Kasusnya

- **Agus Mulyana**  
Lombok Utara (NTB) & Berau (Kaltim)
- **Ilya Moeliono**  
Nabire (Papua) & Tebo (Jambi)
- **Ambrosius Ruwindrijarto**  
Tebo (Jambi) & Konawe Utara (Sultra)
- **Yulita Lestiawati**  
Batanghari (Jambi) & Tanah Bumbu (Kalsel)
- **Ridha Saleh**  
Mediasi Kebijakan Konawe Utara (Sultra)
- **Falatehan Zainy**  
Malang (Jatim)
- **Ginangjar Tamimy**  
Tanah Bumbu (Kalsel)

## Mediator Muda & Kasusnya

- **Agus Pranata**  
Batanghari (Jambi)
- **Andi Adriadi**  
Lombok Utara (NTB), Konawe Utara (Sultra) & Tanah Bumbu (Kalsel)
- **Umi Syamsiatun**  
Tebo (Jambi)
- **Dwi Suciana**  
Lombok Barat (NTB)
- **Huzairi**  
Lombok Utara (NTB)
- **Irwan Humaidi**  
Lombok Utara (NTB)
- **Edie S. Arief**  
Lombok Utara (NTB)

## Pengkaji/Asesor & Kasusnya

- **Perkumpulan Mitra Samya**  
Lombok Utara & Lombok Barat (NTB)
- **Yayasan Puter Indonesia**  
Ketapang (Kalbar) & Malang (Jatim)
- **Jamandi**  
Konawe Utara (Sultra)
- **Fachrunissa**  
Konawe Utara (Sultra)
- **Resi Tri Mulyani**  
Konawe Utara (Sultra)
- **Fitria Indah Putri Djafar**  
Konawe Utara (Sultra)
- **Luqman Chakim**  
Tanah Bumbu (Kalsel)
- **Denny Erlangga**  
Tanah Bumbu (Kalsel)
- **Basyori Saini**  
Tanah Bumbu (Kalsel)
- **Perkumpulan OASE**  
Wajo (Sulsel)
- **Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (PRANA)**  
Batanghari (Jambi) & Konawe Utara (Sultra)
- **Naomi Marasian**  
Nabire (Papua)
- **Mora Dingin**  
Nabire (Papua)





# Manfaat & Keuntungan Perusahaan karena Resolusi Konflik oleh CRU

## Non-Monetary Benefits

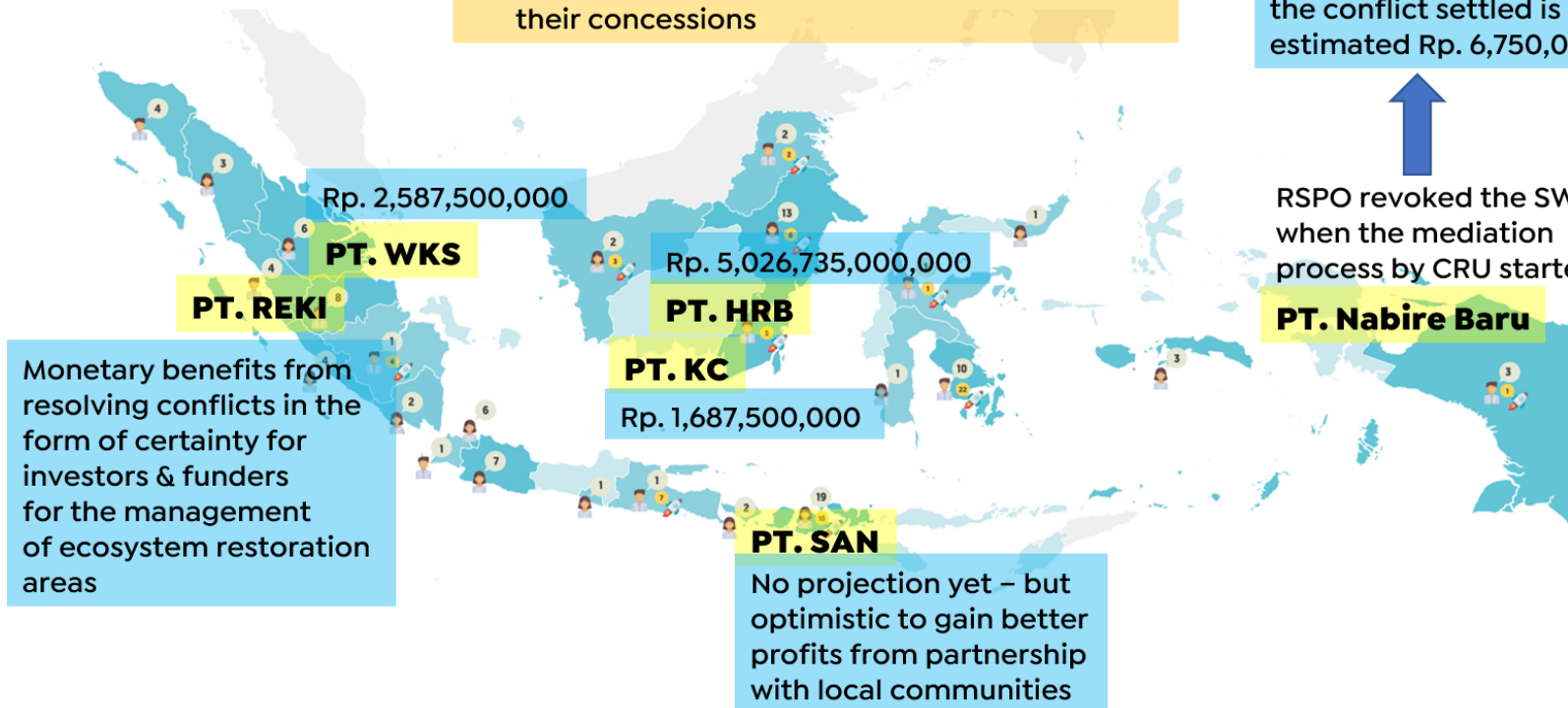
- More effective communication channels between the community and the company
- Inspired FIP project to expand conflict resolution in other villages in Lombok's Rinjani
- Companies no longer need to pay for securing their concessions

CPO production of the company is 15 tons/hour, total values of selling after the conflict settled is estimated Rp. 6,750,000/hour



RSPO revoked the SWO when the mediation process by CRU started

**PT. Nabire Baru**

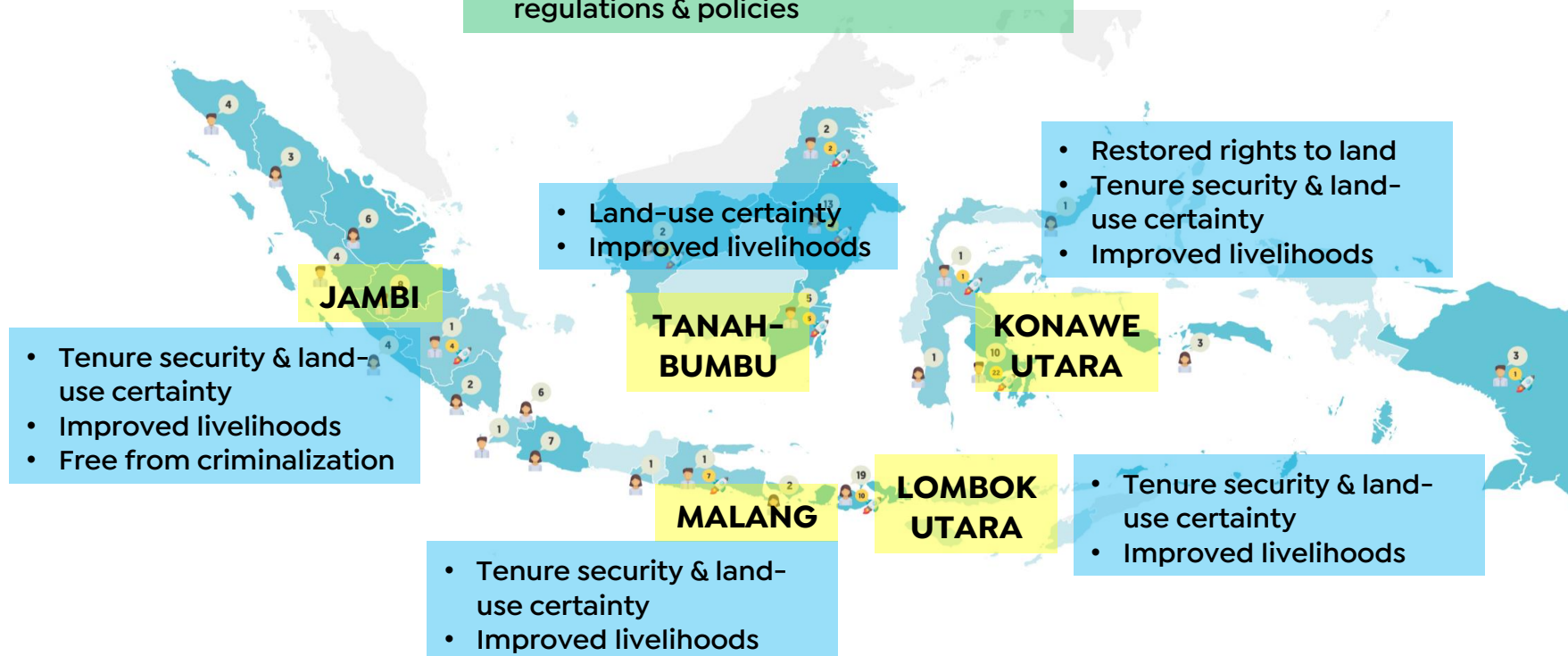




# Manfaat & Keuntungan Masyarakat karena Resolusi Konflik oleh CRU

## General Benefits

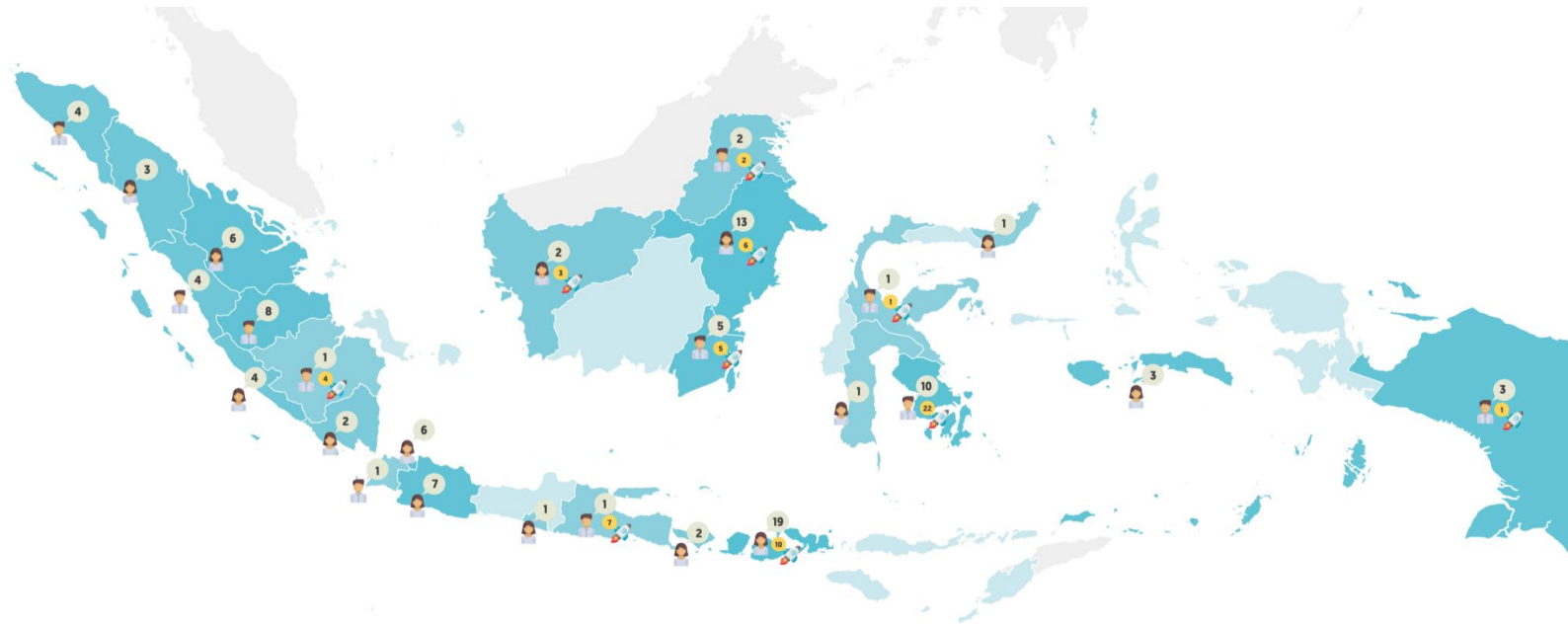
- Improved & more open communication with companies
- Better understanding on land-use regulations & policies





Conflict  
Resolution  
Unit

# Rencana Strategis CRU 2020 - 2024





## Tujuan Strategis 1

Membentuk lembaga layanan resolusi konflik independen yang diamanatkan negara untuk menangani konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan investasi berbasis lahan, menangani masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan memastikan perlindungan lingkungan yang efektif.

## Tujuan Strategis 2

Membangun dukungan dan legitimasi konstituen yang kuat untuk CRU sebagai lembaga layanan resolusi konflik yang andal dan independen dalam memediasi kasus tenurial berbasis lokasi dan implementasi kebijakan nasional dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendekatan penyelesaian konflik

## Tujuan Strategis 3

Mengembangkan lembaga layanan resolusi konflik independen yang kredibel dan sangat profesional.





Conflict  
Resolution  
Unit

# PROGRAM & LAYANAN

**Audit**

**Advisory**

**Conflict Resolution Convener**

**Mediasi Kebijakan Publik**

- Penyelenggaraan resolusi konflik tenurial, agraria dan kekayaan alam di tingkat tapak
  - Pengkajian konflik
  - Mediasi
  - Perumusan kesepakatan
- Penyelenggaraan mediasi pelaksanaan kebijakan publik terkait agraria dan kekayaan alam
- Pengkajian kelayakan konflik tenurial di tingkat tapak untuk dimediasi
- Pemantauan pelaksanaan kesepakatan damai oleh para pihak
- Pendekatan sensitif-konflik dalam perencanaan dan pengembangan proyek pembangunan
- Pengembangan kapasitas dalam kajian dan mediasi konflik
- Pengembangan sistem pengaduan
- Pengembangan sistem manajemen penelusuran kasus
- Riset topikal terkait konflik agraria dan kekayaan alam





# PENDUKUNG & MITRA CRU

**UK Climate Change Unit/UKAid**

**Climate and Land Use Alliance (CLUA)**

**The Ford Foundation Indonesia**

**The David and Lucile Packard Foundation**

**GIZ Forclime**

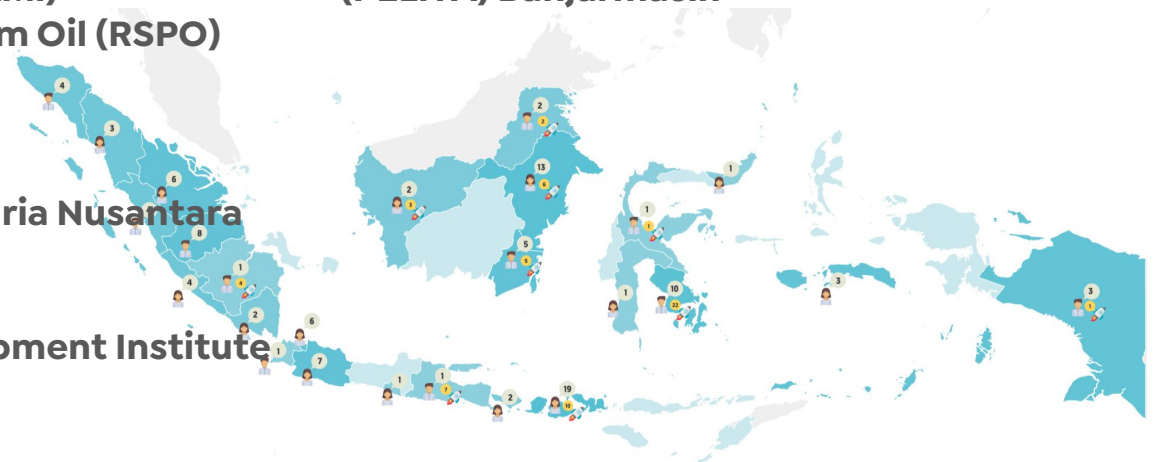
**GIZ Low Emission Oil Palm Development (LEOPALD)**

**GIZ Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement (SCPOPP)**

**GIZ Sustainable Agricultural Supply Chain in Indonesia (SASCI)**

**Kamar Dagang dan Industri (KADIN)  
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)  
Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Ditjen PSKL, KLHK  
Pusat Mediasi Nasional (PMN)  
Pusat Mediasi Indonesia (PMI), Universitas Gadjah Mada  
AZ Law & Conflict Resolution  
Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)  
Rumah Mediasi Indonesia (RMI)  
Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia  
DAEMETER  
Perkumpulan KARSA  
Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (PRANA)  
CAPPA  
Urban and Regional Development Institute (URDI)**

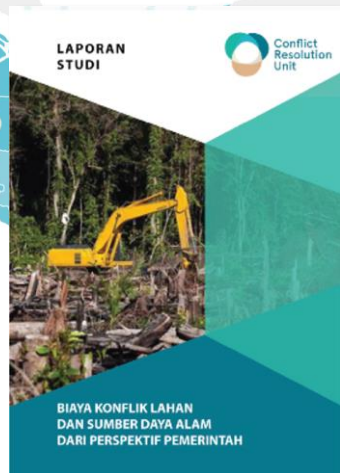
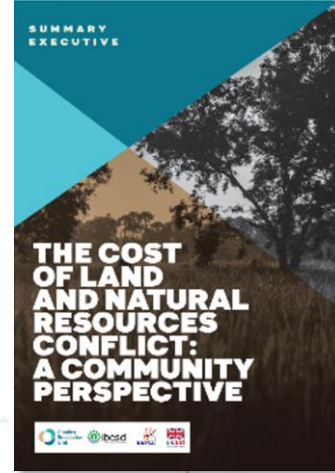
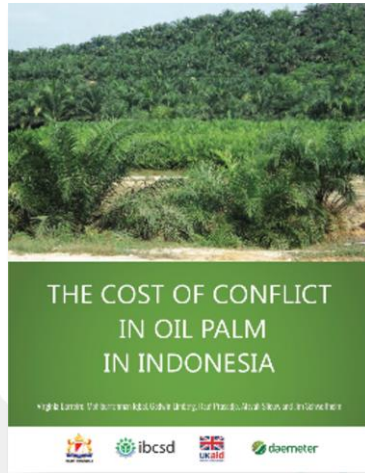
**Yayasan Puter Indonesia  
Paguyuban Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI)  
Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Bali Lite Institute (BLI)  
Perkumpulan Mitra Samya  
Perkumpulan OASE  
Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra  
Pemerhati Lingkungan dan Tambang (PELITA) Banjarmasin**





**Conflict  
Resolution  
Unit**

# PUBLIKASI CRU





BAB IV  
PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA

Pasal 17

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:
  - a. antara orang perorangan;
  - b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
  - c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
  - d. badan hukum dengan badan hukum;
  - e. badan hukum dengan lembaga; dan
  - f. lembaga dengan lembaga.
- (2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sengketa dan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V . . .

## Kelembagaan Independen

Terkait revisi Perpres 86 tahun 2018 → Bab 4 Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3) tentang dibutuhkanannya kelembagaan independen untuk penyelesaian konflik untuk mendukung percepaan Reforma Agraria. CRU tengah berproses ke arah pengembangan kelembagaan independen yang,

- memiliki otoritas atau direstui/didukung oleh K/L terkait atau kelembagaan non-negara yang menjadi mitra strategis pemerintah
- dipercayai oleh para pihak
- memiliki jejaring mediator di sebagian besar wilayah Indonesia, serta
- didukung oleh pembiayaan yang independen – sifatnya seperti *blind trust*, misalnya dana negara non-APBN (misal, BPDFLH).

## Penanganan Konflik

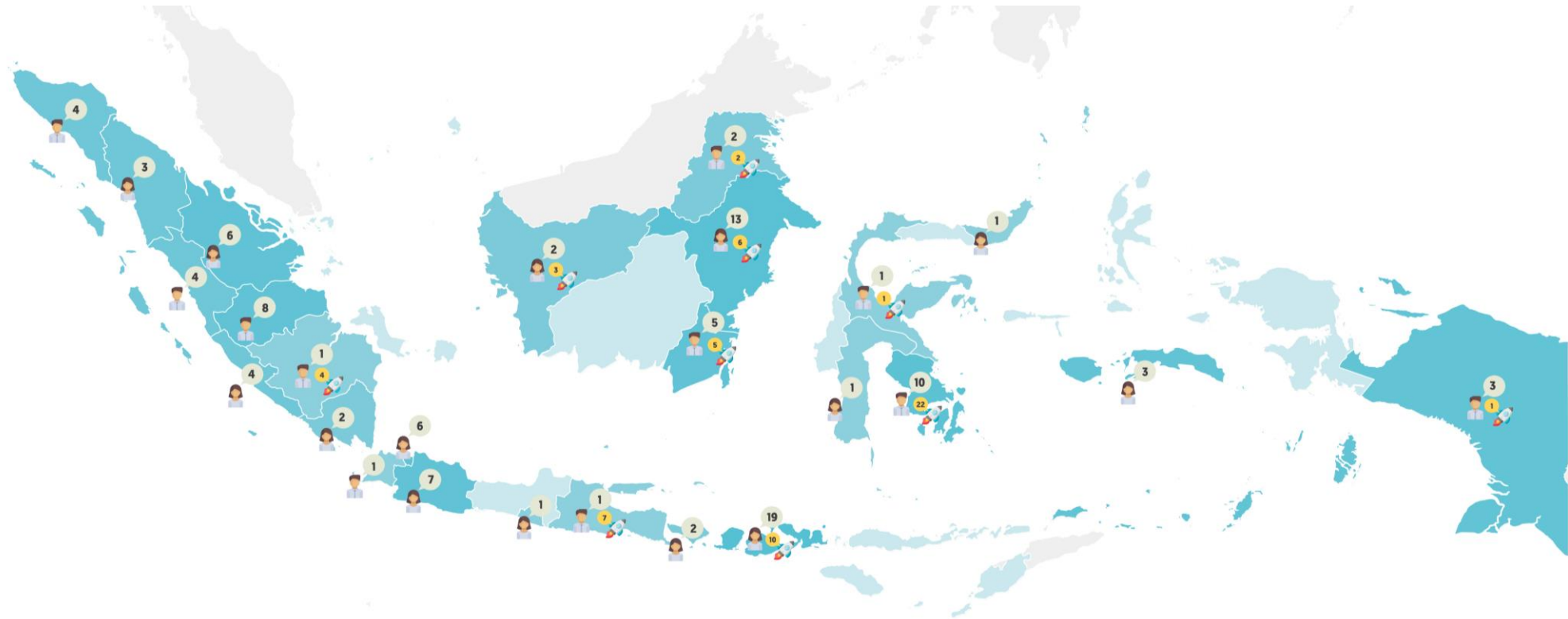
Penyelesaian konflik yang dibahas pada pertemuan Presiden dengan aktivis reforma agraria pada 3 Desember 2020 → konteksnya pembelajaran bersama terkait percepatan Reforma Agraria serta pengembangan kelembagaan yang independen.







**Conflict  
Resolution  
Unit**



**Conflict Resolution Unit  
Indonesia Business Council for Sustainable Development**

<https://www.conflictresolutionunit.id/>